

ANALISA LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT BANTU DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM

ACTUAL BUDGET STATEMENT ANALYSIS AS A TOLL IN INCREASING EFFICIENCY FUND MANAGEMENT IN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AGAM REGENCY

Yulia Syafitri, SE, M.Si, Ak^{*}, Elyatisna, SE^{}**

^{*)} Program Studi Akuntansi, Akademi Akuntansi Indonesia Padang**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran berperan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten agam . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data anggaran dan realisasinya dari tahun 2008-2012 pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten agam. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menerangkan hasil penelitian dan menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis.

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa laporan realisasi anggaran pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten agam sangat berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) Kabupaten agam, tingkat efisiensi anggaran dari tahun 2008-2012 sudah efisien dengan tingkat efisien berada dikisaran 60%-90% yang memiliki kriteria efisien. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten Agam sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kata Kunci: *Laporan Realisasi Anggaran, Efisiensi*

ABSTRAK

This study aims to determine whether the effect of professionalism, professional ethics and This study aims to determine whether the budget realization report serves as a tool to improve the efficiency of the management of funds in the office of national land agency (BPN) Agam district. The data used in this research is secondary data, budget data and the realization of the national land agency office 2008-2012 pada (bpn) Agam district. The analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis done by explaining the research and describe findings in the field variables which do not require the scale hypothesis.

Based on the analysis found that the budget realization report on the office of national land agency (BPN) Agam district was instrumental as a tool to improve the efficiency of the management of funds in the office of national land agency (bpn) agam district, the efficiency level of the 2008-2012 budget has been streamlined with efficient rate is around 60% -90% have efficient criteria. Budget management in the office of national land agency (bpn) Agam district already qualified efficiency is minimal use of funds to achieve maximum results.

Keywords: *Budget Realization Report, Efficiency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah ada beberapa pernyataan, salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan pada masa yang akan datang, umumnya disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah di buat secara efisien dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun dan disajikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai laporan realisasi anggaran. Tujuan standar laporan realisasi anggaran menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam adalah suatu lembaga non departemen yang bergerak di bidang persertifikatan tanah masyarakat. Kas merupakan elemen yang terpenting didalam Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam untuk menunjang kegiatan operasional, oleh karena itu melalui analisa Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat diketahui bagaimana perubahan mengelola dana yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka hal ini pula yang mendorong penulis memilih judul **“ANALISA LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT BANTU DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN AGAM”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor BPN Kab. Agam telah sesuai dengan PSAP No. 2 ?
2. Apakah Laporan Realisasi Anggaran berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada Kantor BPN Kab. Agam ?

Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor BPN Kab. Agam telah sesuai dengan PSAP No. 2?
2. Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada Kantor BPN Kab. Agam ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Menurut Mulyadi (2001:448), “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (*programming*)”.

Menurut M. Nafarin (2007:9), “Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan”.

Pengertian Anggaran menurut Darsono dan Ari Purwati (2008:1), “Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang”.

Dengan demikian anggaran merupakan suatu rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk melakukan serangkaian program kerja tertentu dimasa yang akan datang. Dengan ditetapkannya anggaran maka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dapat dilakukan melalui serangkaian aktivitas atau program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran dan realisasinya pada periode tertentu, yaitu dalam jangka satu tahun.

Jenis-Jenis Anggaran

Menurut M. Nafarin (2007:31), jenis-jenis anggaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran variabel
 - b. Anggaran tetap
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran periodek
 - b. Anggaran kontinyu
3. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran jangka pendek
 - b. Anggaran jangka panjang
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran operasional
 - b. Anggaran Keuangan

Kegunaan Anggaran

Adapun kegunaan pokok anggaran menurut Munandar (2000:10), yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kerja
2. Sebagai alat pengkoordinasi kerja
3. Sebagai alat pengawasan kerja

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Departemen Keuangan RI (2008:53), dalam bukunya Modul Sistem Akuntansi Keuangan Edisi 2 Tahun 2008 yaitu :

“Laporan realisasi anggaran merupakan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan”.

Sedangkan menurut M. Munandar (2001:20) menyatakan bahwa : “Laporan realisasi anggaran adalah laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik penyimpangan yang

menguntungkan maupun yang merugikan, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan tindak lanjut (*follow-up*) yang segera perlu dilakukan.

Menurut PP 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan – LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Dengan laporan LRA tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi penggunaan anggaran.

Unsur – unsur dalam laporan realisasi anggaran

Dalam PP 71 Tahun 2010, penyajian laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain adalah :

1. Akuntansi Pendapatan – LRA
2. Akuntansi Belanja
3. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA
4. Akuntansi Pembiayaan
5. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SILPA/SIKPA)

Pengertian Efisiensi

Definisi efisiensi dijelaskan dalam buku Akuntansi Sektor Publik oleh Mardiasmo (2004:4), “Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu”.

Menurut Handoko, Hani T (2009), “Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010:161), “Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensinya.

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran yg tereliasasi}}{\text{Anggaran yang direncanakan}} \times 100\%$$

Sumber : Kaplan dan Narton (2000)

Untuk melihat hasil dari tingkat efisiensi yang diperoleh, maka disusun kriteria sebagai berikut :

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien

80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kaplan dan Narton (2000)

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara, dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (*budget* atau penganggaran).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip data yang di kelola dengan baik. Selain itu, setiap organisasi seharusnya melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Laporan Realisasi Anggaran Menurut PSAP No. 2

Realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan dalam Realisasi Anggaran
 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 2. Penerimaan Hibah
- b. Belanja dalam Realisasi Anggaran
 - Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Modal
 - d. Belanja tak terduga

Tabel 2.2. Format LRA menurut PSAP No.2
 PEMERINTAH PUSAT
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
 31 DESEMBER 20X0 dan 20X0
 (DalamRupiah)

No	Uraian	Ang gara n 20X 0	Real isasi 20X 0	(%)	Real isasi 20X0
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Pendapatan Cukai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bea Masuk	xxxx	x xxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Ekspor	xxxx	x xxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Lainnya	xxxx	xxxx	xxx x	xxxx
	Jumlah Pendapatan Perpajakan	xxxx	xxxx	xx xx	xxxx
	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENDAPATAN HIBAH				
	Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pendapatan Hibah	x xxx	xxxx	xxxx	xx xx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	x xxx
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Barang	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Bunga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Subsidi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xx x

	Bantuan Sosial	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Lain-lain	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Belanja Operasi	xxx x	xxxx	xxx x	xxxx
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Peralatan dan Mesin	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx x
	Belanja Aset Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxx x
	Jumlah Belanja Modal	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH BELANJA	xxx x	xxxx	xxx x	xxxx
	TRANSFER				
	DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Alokasi Umum	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Alokasi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Jumlah Dana Perimbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	TRANSFER LAINNYA (diseuaikan dengan program yang ada)				
	Dana Otonomi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Penyesuaian	xxxx	xxxx	xxxx	xx
	Jumlah Transfer Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx x	xxxx
	JUMLAH TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
	Penggunaan SiLPA	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Penerimaan Pinjaman Dalam	xxxx	x	xxxx	xxxx

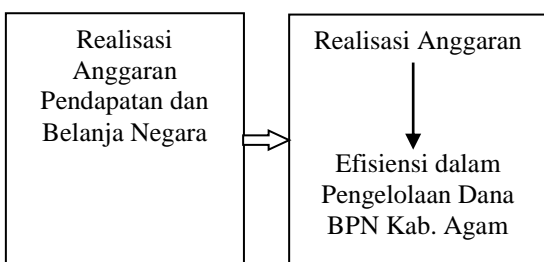
	Negeri - Lainnya				
	Penerimaan dari Divestasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxxx	xxxx	xxxx	xxx x
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENGELUARAN				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				

	LUAR NEGERI				
	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	xxxx	xxxx	xxxx	xx xx

Peranan LRA dalam meningkatkan Efisiensi

Laporan Realisasi Anggaran dapat dikatakan efisiensi dilakukan dengan cara menghubungkan realisasinya dengan biaya standar atau anggarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:132), yaitu : “Satu – satunya cara mengukur efisiensi adalah dengan menggunakan perbandingan antara *input* (anggaran yang dihasilkan) terhadap *output* yang digunakan (realisasinya).

KERANGKA KONSEPTUAL



METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam yang berlokasi di:

- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Padang Baru Timur
- Kecamatan : Lubuk Basung
- Kabupaten : Agam
- Propinsi : Sumatera Barat

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Adapun sejarah singkat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan di Kabupaten Agam bertanggung jawab langsung kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
2. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang berada didalam lingkungannya.
3. Kantor BPN Kab. Agam ini hanya satu-satunya di Wilayah Kabupaten Agam.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu instansi pemerintah merupakan suatu bentuk pengaturan dan pengalokasian tugas dan wewenang serta sumber daya diantara anggota-anggota organisasi sehingga dapat menjadi kelangsungan hidup perusahaan dan dapat mencapai sasaran / tujuan organisasi.

Metode Pengumpulan Data

1. Study Kepustakaan
Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran dll).
2. Study Lapangan
Study lapangan dilakukan langsung di Kantor BPN Kab. Agam

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada bendaharawan Kantor BPN Kab. Agam yang menguasai tentang LRA.
2. Observasi
Dengan mengamati secara langsung data yang terdapat pada kantor BPN Kab. Agam.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi pada kantor BPN Kab. Agam
- b. Data Kuantitatif
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diteliti langsung pada kantor BPN Kab. Agam.

2. Sumber Data

- a. Data Primer
Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung, diambil dan dicatat untuk pertama kalinya berupa wawancara terhadap pegawai Kantor BPN Kab. Agam.
- b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan adalah data Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2008-2012 pada kantor BPN Kabupaten Agam.

Defenisi Operasional Variabel

Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode pelaporan.

Efisiensi adalah perbandingan antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Metode Analisis

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Rumusan masalah yang pertama dapat dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menerangkan hasil penelitian dan menggambarkan

variabel dilapangan tanpa skala hipotesis.

2. Rumusan masalah yang kedua juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan rumus efisiensi :

Anggaran yg tereliasasi

$$\text{Nilai Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran yg tereliasasi}}{\text{Anggaran yang direncanakan}} \times 100\%$$

Anggaran yang direncanakan

Sumber : Kaplan dan Narton (2000)

LRA Kantor BPN Kab. Agam Terhadap PSAP No. 2

1. Proses penyusunan APBN Kantor BPN Kab. Agam

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor BPN Kab. Agam mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perbedaan LRA menurut PSAP No. 2 pada Kantor BPN Kab. Agam

Laporan Realisasi Anggaran pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam terdapat perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut PSAP No. 2 PP 71 tahun 2010, ada beberapa pos-pos yang terdapat pada PSAP No. 2 Tetapi tidak ada di Laporan Realisasi Anggaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam, telah dipaparkan dalam bab IV perbedaan format Laporan Realisasi Anggarannya. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Mengacu pada PSAP No. 2, tetapi tidak terdapat pos-pos seperti Transfer, Pembiayaan dan Silpa/Sikpa hanya terdapat pos pendapatan dan

belanja negara, pada PSAP No. 2 menyajikan laporan realisasi anggaran mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara itu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Relisasi Anggaran berperan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada Kantor BPN Kab. Agam

Pada Kantor Pertanahan terdapat perencanaan berbasis kinerja yaitu perencanaan yang berorientasi kepada *output* dan *outcome*, untuk mewujudkan perencanaan yang berbasis kinerja maka perencanaan harus didasarkan pada :

1. Visi, misi, sasaran, tujuan serta tugas dan fungsi dari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan

2. Efisiensi

Laporan Realisasi Anggaran pada kantor BPN Kabupaten Agam menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing – masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama satu periode, dengan adanya laporan realisasi anggaran pada kantor pertanahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana agar dana tersebut dapat dikelola dengan sebaik mungkin supaya terciptanya pemerintahan yang terarah dalam bagian laporan realisasi anggaran.

Tabel 4.4. Tingkat efisiensi Kantor BPN Kab. Agam

No.	Tahun	Belanja (%)	Keterangan
1.	2008	14.88 %	Sangat Efisien
2.	2009	75.06 %	Efisien
3.	2010	88.25 %	Cukup Efisien
4.	2011	67.95 %	Efisien
5.	2012	77.95 %	Efisien

Sumber : Kantor BPN Kab. Agam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis peroleh adalah Laporan Realisasi Anggaran pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam terdapat perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut PSAP No. 2 PP 71 tahun 2010, ada beberapa pos-pos yang terdapat pada PSAP No. 2 Tetapi tidak ada di Laporan Realisasi Anggaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam, telah dipaparkan dalam bab IV perbedaan format Laporan Realisasi Anggarannya. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Mengacu pada PSAP No. 2, tetapi tidak terdapat pos-pos seperti Transfer, Pembiayaan dan Silpa/Sikpa hanya terdapat pos pendapatan dan belanja negara, pada PSAP No. 2 menyajikan laporan realisasi anggaran mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara itu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Realisasi Anggaran pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam sangat berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam, seperti yang telah dijelaskan pada bab IV bahwa tingkat efisiensi anggaran pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam dari tahun 2008-

2012 sudah efisien dengan tingkat efisien berada dikisaran 60%-90% yang memiliki kriteria efisien. Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran semoga nantinya dapat berguna bagi Pengelolaan Anggaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam dimasa yang akan datang. Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam harus dapat menyajikan data yang akurat sesuai yang telah dinyatakan dalam PSAP No. 2 PP 71 Tahun 2010, hal ini berguna untuk menyusun rencana anggaran selanjutnya yang lebih matang dan demi kelancaran jalannya organisasi pemerintah diwaktu yang akan datang.

Bagian Pengelola anggaran / bendahara penerimaan dan pengeluaran perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola anggaran dan realisasinya untuk satu periode pelaporan dan bendaharawan kantor harus bisa dengan tetap menentukan prioritas anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah karna Laporan Realisasi Anggaran sangat berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono Prawironegoro dan Ari Purwati, 2008, *Akuntansi Manajemen*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Deddi dan Ayuningtyas, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta : Salemba.
- Kaplan, Robert S dan David P. Norton, 2000, *"Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi"*, Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, 2009, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Jakarta : Salemba empat.
- Munandar, M, 2000, *Penganggaran Perusahaan*, Yogyakarta : BPFE.
- Nafarin.M, 2007, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.